

# Renja 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                                                                      | i  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                    | ii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                               | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                             | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                             | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                          | 8  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                      | 9  |
| BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu .....                                               | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                | 23 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....                           | 27 |
| 2.4 Review terhadap RKPD .....                                                                       | 27 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                           | 63 |
| BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                                    | 67 |
| 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....                                               | 67 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....                                                   | 68 |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....                                                          | 69 |
| BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 .....                                 | 73 |
| BAB V Penutup .....                                                                                  | 97 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....                         | 10 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Provsu Tahun 2023 .....                                    | 11 |
| Tabel 2.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....                                             | 12 |
| Tabel 2.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....                                                | 20 |
| Tabel 2.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....                                             | 25 |
| Tabel 2.6 Review terhadap RKPD Tahun 2025.....                                                           | 31 |
| Tabel 2.7 Indikator Kinerja .....                                                                        | 63 |
| Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 .....                                            | 69 |
| Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ..... | 74 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 – 2024 telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 20 45. Kelima arahan tersebut mencakup; Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai salahsatu arahan pembangunan nasional memiliki tantangan pada perwujudan pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dimana salah satunya dilaksanakan melalui strategi meningkatkan Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial dengan sasaran peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Kerja ( Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada masa transisi kekosongan Kepala Daerah dalam jangka 1 (satu) Tahun kedepan. Renja ini merupakan agenda pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. Renstra merupakan arah pembangunan ingin dicapai oleh Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun rencana pembangunan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja ( Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai

dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain daripada itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyeragaman program kegiatan dan sub kegiatan dalam setiap urusan pembangunan, termasuk pada urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, turut menjadi dasar dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 – 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan Renja Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Perananan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
- 14) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 25) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- 26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 30) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 31) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistim Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);



- 35) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 36) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional;
- 37) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 38) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 39) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 40) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 41) Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 42) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- 43) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
- 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 46) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 47) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
- 48) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi

- Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
- 49) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13;
- 50) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20;
- 51) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 52) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- 53) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 54) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
- 55) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- 56) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
- 57) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 58) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/357/KPTS/2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) setelah Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2025;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap RKPD / Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

**BAB V. PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusun perjanjian kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Tujuan                                                             | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                              | Satuan                         | Target 2023 |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi               | %                              | 100%        |
| 2. | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak              | Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak              | Rasio kekerasan terhadap perempuan                             | per 100.000 penduduk perempuan | 8           |
|    |                                                                    |                                                                                  | Rasio kekerasan terhadap anak                                  | per 100.000 penduduk usia anak | 16          |
| 3. | Meningkatkan pemenuhan hak anak                                    | Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak                    | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi | %                              | 100%        |
| 4. | Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas       | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana                  | Total Fertility Rate (TFR)                                     | point                          | 2,85        |
|    |                                                                    |                                                                                  | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moder                         | %                              | 50,31%      |
|    |                                                                    |                                                                                  | Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi               | %                              | 25,10%      |

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran

keberhasilan pembangunan daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta perwujudan keseimbangan penduduk dan keluarga yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, harus dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas P3AKB ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan beberapa penyesuaian target sbb :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Provsu Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                              | Target 2023                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi               | 100%                            |
| 2. | Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak              | Rasio kekerasan terhadap perempuan                             | 8 / 100.000 penduduk perempuan  |
|    |                                                                                  | Rasio kekerasan terhadap anak                                  | 16 / 100.000 penduduk usia anak |
| 3. | Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak                    | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi | 100%                            |
| 4. | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana                  | Total Fertility Rate (TFR)                                     | 2,85                            |
|    |                                                                                  | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moder                         | 50,31%                          |

|  |  |                                                  |        |
|--|--|--------------------------------------------------|--------|
|  |  | Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi | 25,10% |
|--|--|--------------------------------------------------|--------|

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator                                                                         | Target | Realisasi | Capaian | Sumber Data                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG                                | 100%   | 100%      | 100%    | Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AKB Provsu                                                   |
| 2  | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan          | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                                                | 8      | 7         | 88%     | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu                          |
|    |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                                                     | 16     | 21        | 76%     |                                                                                                            |
| 3  | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak                                                | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 100%   | 100%      | 100%    | Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB Provsu                                                               |
| 4  | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)                                               | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)                                  | 2,85   | 2,39      | 116%    | Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P3AKB Provsu |
| 5  | Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)   | mCPR/modern Contraceptive Prevalence (Persentasi Pemakaian Kontrasepesi Modern)   | 60%    | 55,59%    | 93%     |                                                                                                            |
| 6  | Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need                                               | Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                     | 12,40% | 19,66%    | 63%     |                                                                                                            |

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2023

### **Sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah.**

Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2023 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 42 Perangkat Daerah atau sebesar 100% dari total jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 42 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Adapun ke 42 Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Inspektorat Daerah Provinsi
4. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
5. Biro Hukum Setdaprovsu
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
7. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
8. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
9. Biro Perekonomian Setdaprovsu
10. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
11. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
12. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
13. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
14. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
17. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara



20. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
21. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
22. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
24. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
26. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
27. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
29. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
31. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
35. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
36. RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
37. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara
38. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
39. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
40. Biro Organisasi Setdaprovsu
41. Biro Umum Setdaprovsu
42. RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian sebanyak 42 Perangkat Daerah dari target sebanyak 42 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik.

**Sasaran Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mengalami Kekerasan.**

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2023, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 8 perempuan mengalami kekerasan. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2023 terdapat 407 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.451.895. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 7 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2023 memiliki target sebesar 16 orang anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2023 terdapat 995 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.631.438. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak, sebanyak 21 orang anak mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, memperlihatkan perlunya intervensi yang lebih kuat kepada upaya pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

### **Sasaran Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak**

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 27 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 100% dari total keseluruhan perangkat daerah potensial (27 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 27 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 100% dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip
5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Dinas Sosial

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Dinas Kesehatan Provsu
12. Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
17. Biro Umum
18. Dinas PMD Dukcapil
19. RSUD Haji
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Perhubungan
22. Rumah sakit jiwa
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. Dinas Ketenagakerjaan
25. Dinas Pendidikan
26. Biro Hukum
27. Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai pengampu kegiatan implementasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak.

### **Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)**

*Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka Kelahiran Total menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator TFR dibutuhkan untuk dapat membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil

dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, TFR juga dapat digunakan sebagai salah satu parameter proyeksi jumlah penduduk.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Faktor Ekonomi misalnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi fertilitas. Ketika pendapatan seseorang meningkat akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas.

Berdasarkan PK23 ADJ SUSENAS 2023, TFR Sumatera Utara sebesar 2,39 mengalami penurunan 0,09 poin dari tahun 2022 yaitu 2,48 (Long Form SP 2020). Namun, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional sebesar 2,144 (PK23 ADJ SUSENAS 2023).

### **Sasaran Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)**

Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Sebelum menghitung mCPR, terlebih dahulu dilakukan penghitungan prevalensi kontrasepsi (CPR) untuk semua metode, yaitu persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun metode kontrasepsi tradisional terhadap jumlah PUS.

Capaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*) 2022 : 46,56 %.

Capaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*) 2023 : 55,59 % (*Sumber New SIGA BKKBN 2022, 2023*).

Dari data tersebut dapat dilihat ada peningkatan prevalensi peserta aktif KB untuk semua metode kontrasepsi. Pada tahun 2022 mencapai 46,56% dan tahun 2023 menjadi 55,59%, artinya terjadinya peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern di Sumatera Utara.

Prevalensi Peserta KB Aktif (semua metode) Tahun 2022 : 46,98%

Prevalensi Peserta KB Aktif (semua metode) Tahun 2023 : 55,59%

(*Sumber : New SIGA BKKBN Perwakilan 2022, 2023*)

## **Sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed**

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

*Unmet Need* KB merupakan kebutuhan PUS untuk ber-KB, tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Capaian *Unmet Need* harus terus diturunkan sehingga dapat menunjang keberhasilan Program Keluarga Berencana. *Unmet need* dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi (alkon) yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien. Persoalan muncul ketika alat kontrasepsi yang didistribusikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jeda waktu pengusulan dengan realisasi alat kontrasepsi yang cukup panjang menjadi salah satu faktor penyebab perubahan pemilihan alat kontrasepsi. Pertimbangan administrasi distribusi alat kontrasepsi menjadi persoalan lain kasus *unmet need*. Salah satu indikator keberhasilan program KB, baik dalam tataran Indonesia maupun global, adalah terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi.

Pengalaman kegagalan penggunaan kontrasepsi, umur anak terakhir, dan umur pasangan usia subur (PUS) menjadi referensi dalam pemilihan alat kontrasepsi. Sementara itu, pada sisi yang lain, alat kontrasepsi yang tersedia justru yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi inilah yang memicu kesulitan menekan *unmet need*. Umur anak terakhir dan pengalaman tidak menggunakan alat kontrasepsi yang tidak berakhir dengan kehamilan menjadi alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kelompok inilah yang menjadi salah satu sasaran program KB dalam melaksanakan kebijakan pengendalian jumlah penduduk.

Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi dapat meningkatkan cakupan pengguna keluarga berencana. Pemberi layanan dituntut memberikan informasi terkait dengan pilihan metode, termasuk manfaat dan risiko yang ditimbulkannya, tempat konseling, tempat pelayanan penggunaan alat kontrasepsi, dan keberlanjutan pelayanan. Kualitas informasi yang diberikan kepada PUS sangat tergantung pada kompetensi pemberi layanan. Bentuk layanan KB yang diberikan oleh pemberi layanan bukan sekadar menyediakan alat kontrasepsi, tetapi memperhatikan kebutuhan sosial dan kesehatan calon akseptor. Keputusan PUS dalam pemilihan kontrasepsi mempertimbangkan keefektifan metode, mengetahui kelebihan dan kelemahan metode, cara pemakaian alat kontrasepsi, tanda-tanda efek samping kontrasepsi dan cara mengatasi efek samping alat kontrasepsi.

Persentase PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (*unmet need*) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 turun secara bermakna menjadi 19,66% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 35,4%. Walaupun capaian tahun 2023 telah mampu diturunkan secara tajam, namun target *unmet need* Provinsi Sumatera Utara maupun target *unmet need* nasional belum tercapai di bawah angka 10%. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi terkait program Keluarga Berencana kepada masyarakat, selain itu minimnya anggaran APBD Provsu tahun 2023 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di kabupaten/kota yang langsung menyentuh masyarakat terutama pada wilayah khusus seperti daerah dengan kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, padat penduduk dan miskin perkotaan.

Secara umum, capaian beberapa sasaran strategis cukup baik, namun masih mengalami beberapa kendala yang memerlukan solusi untuk ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi**

| No | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator                                          | Target | Realisasi | Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                            | Solusi yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 100%   | 100%      | 100%    | Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasi indikator melalui optimalisasi tugas dan fungsi dari SDM yang terlibat aktif dalam integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara                                                                                     |
| 2  | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan          | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                 | 8      | 7         | 88%     | Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan                                                                                     | Penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO<br><br>Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pemberian layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
|    |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                      | 16     | 21        | 76%     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                        |                                                                                   |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak                                             | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 100% | 100%   | 100% | Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                                                                   | Penguatan kebijakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder potensial                                               |
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)                                            | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)                                  | 2,85 | 2,39   | 116% | 1. Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang dibandingkan tahun sebelumnya karena meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi di daerah.<br>2. Meningkatnya pemakaian alat KB pasca persalinan karena semakin terinformasikannya pemakaian alat kontrasepsi kepada bidan bidan desa. | Kegiatan KIE yang ditujukan untuk menginformasikan Program Keluarga Berencana bagi masyarakat dan juga petugas kesehatan di tingkat desa/kelurahan agar terus dilakukan dan ditingkatkan. |
| 5 | Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | mCPR/modern Contraceptive Prevalence (Persentasi Pemakaian Kontrasepsi Modern)    | 60%  | 55,59% | 93%  | Belum optimalnya perluasan jejaring kemitraan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam komunikasi, edukasi dan penyebaran informasi tentang program KB                                                                                                                                               | Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Program KB yang komprehensif berbasis wilayah dan fokus pada segmentasi sasaran.<br><br>Mengembangkan dan menguatkan Jejaring                      |



|   |                                                            |                                                               |        |        |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed | Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 12,40% | 19,66% | 63% | Terbatasnya anggaran intervensi program KB di daerah | Kemitraan dalam Program KB.<br><br>Meningkatkan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dengan melibatkan sektor-sektor terkait secara komprehensif. Meningkatkan penyelenggaraan Advokasi dan KIE yang sesuai dengan karakteristik budaya dan segmentasi sasaran. |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bila melihat tabel di atas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja dari urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara.

Capaian dari indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, indikator Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak dan indikator Angka Kelahiran Total yang sudah mencapai 100 % secara umum didukung oleh tingginya komitmen dari para pengambil kebijakan di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian upaya peningkatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara dan Penguatan kebijakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder potensial.

Beberapa indikator yang tidak tercapai hingga akhir kinerja Renstra (Tahun 2023) seperti Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi secara umum memiliki kendala pada minimnya anggaran intervensi dan beberapa kendala teknis lainnya seperti belum optimalnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan dan belum meluasnya jejaring mitra intervensi program dan kegiatan di 33 kabupaten/kota. Dengan kondisi ini maka Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan beberapa strategi seperti upaya peningkatan koordinasi dalam penyesuaian anggaran intervensi yang meliputi 33 kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM teknis serta perluasan jejaring kerjasama mitra yang melibatkan lembaga/organisasi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik budaya dan segmentasi sasaran.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Provinsi Sumatera Utara maka dituangkanlah kinerja tersebut ke dalam beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG;
2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
3. Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
4. TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total);
5. mCPR/modern Contraceptive Prevalence (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern);
6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 memperlihatkan adanya perlambatan kenaikan target kinerja walaupun tidak keseluruhan target yang disebabkan adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran sebagai respon atas kondisi yang terjadi di Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| No | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator                                                                         | Kinerja |           |         | Anggaran    |             |         | Efisiensi   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
|    |                                                                                                           |                                                                                   | Target  | Realisasi | Capaian | Target      | Realisasi   | Capaian |             |
| 1  | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG                                | 100%    | 100%      | 100%    | 621.027.400 | 595.055.100 | 96%     | 25.972.300  |
| 2  | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan          | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan                                                | 8       | 7         | 88%     | 722.410.686 | 598.241.188 | 83%     | 124.169.498 |
|    |                                                                                                           | Rasio Kekerasan Terhadap Anak                                                     | 16      | 21        | 76%     | 509.820.400 | 451.212.700 | 89%     | 58.607.700  |
| 3  | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak                                                | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 100%    | 100%      | 100%    | 468.638.000 | 460.523.000 | 98%     | 8.115.000   |
| 4  | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)                                               | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)                                  | 2,85    | 2,39      | 119%    | 328.254.300 | 320.441.011 | 98%     | 7.813.289   |

|   |                                                                                                        |                                                                                |         |        |     |             |             |     |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|-------------|-------------|-----|------------|
| 5 | Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | mCPR/modern Contraceptive Prevalence (Persentasi Pemakaian Kontrasepsi Modern) | 60%     | 55,59% | 93% | 430.509.460 | 375.875.250 | 87% | 54.634.210 |
| 6 | Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need                                            | Persentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                  | 12,40 % | 19,66% | 63% | 83.315.000  | 74.215.000  | 89% | 9.100.000  |

### 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik, namun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang diharmonisasikan dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian terkait, maka terdapat beberapa isu penting pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak;
5. Pencegahan perkawinan anak.
6. Pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas

### 2.4 Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKPD Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. Top-down, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. Bottom-up, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.
- c. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi, berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- f. Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan melalui usulan proposal. Proposal akan diseleksi melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan RKPD
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- d. Perumusan Akhir RKPD
- e. Penetapan RKPD

Kedudukan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan RKPD tahun ke-2 selama periode RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan RPD

menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPD dan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renstra menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran per kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sebelum ditetapkan RAPBD, RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas I-3 RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD. KUA memberikan suatu gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran ke depan. Berdasarkan KUA, PPAS menetapkan prioritas plafon anggaran untuk setiap perangkat daerah berdasarkan fungsinya, plafon anggaran akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan anggaran per program per kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunannya. Atas dasar itu, perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan anggaran. Akumulasi dari semua Rencana Kerja dan anggaran bagi seluruh Perangkat Daerah akan melahirkan RAPBD.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Beberapa agenda prioritas terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang masuk dalam agenda RKPD 2025 diantaranya yaitu :

- a. Pengentasan dan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- b. Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak;
- e. Optimalisasi upaya pencegahan dan penangganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, dan;
- f. Upaya perwujudan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

**Tabel 2.6**  
**Review terhadap RKPD Tahun 2025**

| No       | RKPD                                                                                       |                                                                                       |        |                        |                       | ANALISIS KEBUTUHAN                                                                         |                                                                                       |        |                        |                       | Catatan Penting |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|          | Program/Kegiatan                                                                           | Indikator                                                                             | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif        | Program/Kegiatan                                                                           | Indikator                                                                             | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana        |                 |
|          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>              |                                                                                       |        |                        | <b>26.647.435.212</b> |                                                                                            |                                                                                       |        |                        | <b>29.970.491.212</b> |                 |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                          |                                                                                       |        |                        | <b>5.368.954.187</b>  | <b>PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                          |                                                                                       |        |                        | <b>5.368.954.187</b>  |                 |
| <b>1</b> | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                       |        |                        | <b>170.803.000</b>    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                       |        |                        | <b>170.803.000</b>    |                 |
| 1        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                        | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | Sumut  | 4 Laporan              | 84.635.000            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                        | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | Sumut  | 4 Laporan              | 84.635.000            |                 |

|   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |       |             |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |       |             |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|--|
| 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                 | Sumut | 4 Dokumen   | 86.168.000    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                             | Sumut | 4 Dokumen   | 86.168.000    |  |
| 2 | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>        |                                                                                                                                     |       |             | 1.050.000.000 | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>        |                                                                                                                                                 |       |             | 1.050.000.000 |  |
| 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan | Sumut | 150 Lembaga | 1.050.000.000 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi | Sumut | 150 Lembaga | 1.050.000.000 |  |

|   |                                                                                                      |                                                                                                                                                |       |           |               |                                                                                                      |                                                                                                                                                |       |           |               |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--|
|   |                                                                                                      | partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi                                                                             |       |           |               |                                                                                                      | perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi                                                                                         |       |           |               |  |
| 3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi       |                                                                                                                                                |       |           | 4.148.151.187 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi       |                                                                                                                                                |       |           | 4.148.151.187 |  |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi | Sumut | 800 Orang | 4.024.261.187 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi | Sumut | 800 Orang | 4.024.261.187 |  |

|           |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |       |           |                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |       |           |                    |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--|
| 5         | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                        | Sumut | 21 Unit   | 123.890.000        | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                                           | Sumut | 21 Unit   | 123.890.000        |  |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               |                                                                                                                   |       |           | <b>414.885.966</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               |                                                                                                                                      |       |           | <b>414.885.966</b> |  |
| <b>4</b>  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                                                                                                                   |       |           | <b>50.847.500</b>  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                                                                                                                                      |       |           | <b>50.847.500</b>  |  |
| 6         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan | Sumut | 4 Dokumen | 50.847.500         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan | Sumut | 4 Dokumen | 50.847.500         |  |

|   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |       |          |             |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |       |          |             |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--|
|   |                                                                                                                           | terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                        |       |          |             |                                                                                                                           | Kewenangan Provinsi                                                                                                                           |       |          |             |  |
| 5 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                            |                                                                                                                                               |       |          | 364.038.466 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                            |                                                                                                                                               |       |          | 364.038.466 |  |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Sumut | 20 Orang | 34.508.750  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Sumut | 20 Orang | 34.508.750  |  |

|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |       |           |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |       |           |                   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--|
| 8   | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                        | Sumut | 500 org   | 188.977.050       | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                        | Sumut | 500 org   | 188.977.050       |  |
| 9   | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Sumut | 2 Dokumen | 140.552.666       | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Sumut | 2 Dokumen | 140.552.666       |  |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |           | <b>84.952.506</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                    |       |           | <b>84.952.506</b> |  |

|    |                                                                                                        |                                                                                                               |       |           |            |                                                                                                        |                                                                                                               |       |           |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--|
| 6  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                               |       |           | 84.952.506 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                               |       |           | 84.952.506 |  |
| 10 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga kewenangan Provinsi | Sumut | 2 Dokumen | 84.952.506 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga kewenangan Provinsi | Sumut | 2 Dokumen | 84.952.506 |  |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                        |                                                                                                               |       |           | 67.312.000 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                        |                                                                                                               |       |           | 67.312.000 |  |



|    |                                                                                                                       |                                                                                               |       |           |             |                                                                                                                       |                                                                                               |       |           |             |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|
| 7  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                               |       |           | 67.312.000  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                               |       |           | 67.312.000  |  |
| 11 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                              | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                    | Sumut | 3 Dokumen | 24.382.000  | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                              | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                    | Sumut | 3 Dokumen | 24.382.000  |  |
| 12 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Sumut | 2 Dokumen | 42.930.000  | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Sumut | 2 Dokumen | 42.930.000  |  |
| V  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                      |                                                                                               |       |           | 524.301.000 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                      |                                                                                               |       |           | 524.301.000 |  |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |       |                     |             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |       |                     |             |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--|
| 8  | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                       |                                                                                                                                                                    |       |                     | 147.622.000 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                       |                                                                                                                                                                    |       |                     | 147.622.000 |  |
| 13 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | Sumut | 25 perangkat daerah | 147.622.000 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | Sumut | 25 perangkat daerah | 147.622.000 |  |
| 9  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            |                                                                                                                                                                    |       |                     | 376.679.000 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            |                                                                                                                                                                    |       |                     | 376.679.000 |  |

|           |                                                                                                          |                                                                                                                               |       |           |                    |                                                                                                          |                                                                                                                               |       |           |                    |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--|
| 14        | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                   | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                      | Sumut | 500 Orang | 228.229.000        | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                   | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                      | Sumut | 500 Orang | 228.229.000        |  |
| 15        | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Sumut | 4 Dokumen | 148.450.000        | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Sumut | 4 Dokumen | 148.450.000        |  |
| <b>VI</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                  |                                                                                                                               |       |           | <b>276.588.850</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                  |                                                                                                                               |       |           | <b>726.588.850</b> |  |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                  |       |           |                    |                                                                                                                               |                                                                                                                  |       |           |                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--|
| 10 | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                  |       |           | <b>115.327.056</b> | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                  |       |           | <b>115.327.056</b> |  |
| 16 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi          | Sumut | 1 Dokumen | 50.655.000         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi          | Sumut | 1 Dokumen | 50.655.000         |  |
| 17 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA | Sumut | 50 Orang  | 64.672.056         | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA | Sumut | 50 Orang  | 64.672.056         |  |

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                   |       |            |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                   |       |            |                |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|--|
|    |                                                                                                                                                                   | Kewenangan Provinsi                                                               |       |            |             |                                                                                                                                                                   | Kewenangan Provinsi                                                               |       |            |                |  |
| 11 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                   |       |            | 161.261.794 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                   |       |            | 611.261.794,00 |  |
| 18 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                    | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Sumut | 5 Kegiatan | 82.126.744  | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                    | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Sumut | 5 Kegiatan | 82.126.744     |  |
| 19 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                  | Sumut | 4 Dokumen  | 44.626.300  | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                  | Sumut | 4 Dokumen  | 44.626.300     |  |

|            |                                                                                                                  |                                                                                                                           |       |           |                    |                                                                                                                  |                                                                                                                           |       |           |                       |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--|
| 20         | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan              | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | Sumut | 20 Orang  | 34.508.750         | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan              | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | Sumut | 20 Orang  | 34.508.750            |  |
| 21         | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus                                                                      | Sumut | 500 orang | 250.000.000        | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus                                                                      | Sumut | 800 orang | 450.000.000           |  |
| <b>VII</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                             |                                                                                                                           |       |           | <b>365.766.700</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                             |                                                                                                                           |       |           | <b>365.766.700,00</b> |  |
| 12         | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian |                                                                                                                           |       |           | 287.366.150        | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian |                                                                                                                           |       |           | 287.366.150,00        |  |

|    | Kuantitas Penduduk                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |       |           |            | Kuantitas Penduduk                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |       |           |               |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--|
| 22 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                               | Sumut | 2 Dokumen | 81.750.750 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                 | Sumut | 2 Dokumen | 81.750.750,00 |  |
| 23 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk memperkuat Integrasi Program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga | Sumut | 2 Daerah  | 85.415.400 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk memperkuat Integrasi Program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga | Sumut | 2 Daerah  | 85.415.400,00 |  |

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |       |           |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |       |           |                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--|
|    |                                                                                                                                                                  | Berencana<br>(Bangga<br>Kencana)<br>dan Sektor<br>Lain                                                                                                                         |       |           |             |                                                                                                                                                                  | Kencana) dan<br>Sektor Lain                                                                                                                                                    |       |           |                |  |
| 24 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Sumut | 5 Laporan | 120.200.000 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Sumut | 5 Laporan | 120.200.000,00 |  |



|             |                                                                                                       |                                                                                                            |       |           |                    |                                                                                                       |                                                                                                            |       |           |                      |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--|
| 13          | <b>Pemetaan<br/>Perkiraan<br/>Pengendalian<br/>Penduduk<br/>Cakupan Daerah<br/>Provinsi</b>           |                                                                                                            |       |           | <b>78.400.550</b>  | <b>Pemetaan<br/>Perkiraan<br/>Pengendalian<br/>Penduduk<br/>Cakupan Daerah<br/>Provinsi</b>           |                                                                                                            |       |           | <b>78.400.550,00</b> |  |
| 25          | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Profil program bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Sumut | 1 Dokumen | 78.400.550         | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Profil program bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Sumut | 1 Dokumen | 78.400.550,00        |  |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                      |                                                                                                            |       |           | <b>392.816.000</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                      |                                                                                                            |       |           | <b>392.816.000</b>   |  |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |           |             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |       |           |             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|
| 14 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                                                                       |       |           | 285.541.000 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                                                                       |       |           | 285.541.000 |  |
| 26 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Sumut | 4 Dokumen | 40.130.000  | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Sumut | 4 Dokumen | 40.130.000  |  |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |       |           |            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |       |           |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--|
| 27 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                           | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Sumut | 7 Daerah  | 29.861.000 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                           | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Sumut | 7 Daerah  | 29.861.000 |  |
| 28 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga,                                                  | Sumut | 9 Laporan | 94.924.000 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga,                                                  | Sumut | 9 Laporan | 94.924.000 |  |

|    |                                                                                                                                                              |                                                                                    |       |          |                    |                                                                                                                                                              |                                                                                    |       |          |                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|--|
|    |                                                                                                                                                              | kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |       |          |                    |                                                                                                                                                              | kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |       |          |                    |  |
| 29 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja   | Sumut | 3 Daerah | 120.626.000        | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja   | Sumut | 3 Daerah | 120.626.000        |  |
| 15 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |                                                                                    |       |          | <b>107.275.000</b> | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |                                                                                    |       |          | <b>107.275.000</b> |  |

|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |       |               |             |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |       |               |             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--|
| 30 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Sumut | 25 Organisasi | 107.275.000 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Sumut | 25 Organisasi | 107.275.000 |  |
| IX | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                         |                                                                                                                                                                          |       |               | 202.188.000 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                         |                                                                                                                                                                          |       |               | 202.188.000 |  |
| 16 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan |                                                                                                                                                                          |       |               | 154.500.000 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan |                                                                                                                                                                          |       |               | 154.500.000 |  |

|    | Kesejahteraan Keluarga                                                                          |                                                                                                          |       |               |            | Kesejahteraan Keluarga                                                                          |                                                                                                          |       |               |            |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--|
| 31 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB         | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | Sumut | 25 organisasi | 43.020.000 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB         | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | Sumut | 25 organisasi | 43.020.000 |  |
| 32 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK               | Sumut | 3 Dokumen     | 39.670.000 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK               | Sumut | 3 Dokumen     | 39.670.000 |  |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                  |       |            |            |                                                                                                             |                                                                                                                                  |       |            |            |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--|
| 33 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                 | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                  | Sumut | 3 Kelompok | 42.680.000 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                 | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                  | Sumut | 3 Kelompok | 42.680.000 |  |
| 34 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Sumut | 3 Daerah   | 29.130.000 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Sumut | 3 Daerah   | 29.130.000 |  |

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |       |           |            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |       |           |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--|
| 17 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                       |       |           | 47.688.000 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                       |       |           | 47.688.000 |  |
| 35 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Sumut | 1 Dokumen | 15.081.000 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Sumut | 1 Dokumen | 15.081.000 |  |
| 36 | Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan                | Sumut | 2 Laporan | 16.000.000 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                     | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                | Sumut | 2 Laporan | 32.607.000 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengelolaan Keuangan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |            |  |
| 37 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Sumut | 30 Organisasi | 16.607.000 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Sumut | 30 Organisasi | 16.607.000 |  |

|           |                                                                         |                                                   |       |                       |                       |                                                                         |                                                   |  |                       |                       |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
|           |                                                                         | an Ekonomi Keluarga                               |       |                       |                       |                                                                         |                                                   |  |                       |                       |  |
| <b>X</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                                                   |       |                       | <b>18.449.159.983</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                                                   |  |                       | <b>21.322.215.983</b> |  |
| <b>18</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                   |       |                       | <b>124.432.000</b>    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                   |  |                       | <b>124.432.000</b>    |  |
| 38        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | Medan | 11 Dokumen            | 124.432.000           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       |  | 11 Dokumen            | 124.432.000           |  |
| <b>19</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                   |       |                       | <b>13.065.221.270</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                   |  |                       | <b>13.065.221.270</b> |  |
| 39        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Medan | 12 bulan Orang/ Bulan | 13.065.221.270        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 12 bulan Orang/ Bulan | 13.065.221.270        |  |
| <b>20</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                   |       |                       | <b>2.185.673.312</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                   |  |                       | <b>2.185.673.312</b>  |  |

|    |                                                         |                                                                                        |       |             |                      |                                                         |                                                                                        |  |             |                      |  |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------|--|
| 40 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Medan | 12 Laporan  | 1.704.448.312        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |  | 12 Laporan  | 1.704.448.312        |  |
| 41 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Medan | 12 Laporan  | 474.400.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 12 Laporan  | 474.400.000          |  |
| 42 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Medan | 4 Laporan   | 6.825.000            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |  | 4 Laporan   | 6.825.000            |  |
| 21 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>               |                                                                                        |       |             | <b>1.958.134.918</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>               |                                                                                        |  |             | <b>1.958.134.918</b> |  |
| 43 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Medan | 100 Laporan | 1.200.369.050        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  | 100 Laporan | 1.200.369.050        |  |

|    |                                                                  |                                                                              |       |             |             |                                                                  |                                                                              |  |             |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 44 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Medan | 100 Dokumen | 6.248.000   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  | 100 Dokumen | 6.248.000   |  |
| 45 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Medan | 4 Paket     | 32.051.950  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |  | 4 Paket     | 32.051.950  |  |
| 46 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Medan | 3 Paket     | 494.804.341 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |  | 3 Paket     | 494.804.341 |  |
| 47 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Medan | 8 Paket     | 203.936.025 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  | 8 Paket     | 203.936.025 |  |
| 48 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                  | Medan | 2 Paket     | 20.725.552  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan                  |  | 2 Paket     | 20.725.552  |  |

|    |                                                                  |                                                                                     |       |            |             |                                                                  |                                                                                     |  |            |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|--|
|    |                                                                  | Kantor yang Disediakan                                                              |       |            |             |                                                                  | Kantor yang Disediakan                                                              |  |            |             |  |
| 22 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                                                                                     |       |            | 185.420.000 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                                                                                     |  |            | 185.420.000 |  |
| 49 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Medan | 61 Orang   | 127.270.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 61 Orang   | 127.270.000 |  |
| 50 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | Medan | 61 Paket   | 58.150.000  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |  | 61 Paket   | 58.150.000  |  |
| 23 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |                                                                                     |       |            | 205.590.000 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |                                                                                     |  |            | 205.590.000 |  |
| 51 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | Medan | 12 Dokumen | 205.590.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |  | 12 Dokumen | 205.590.000 |  |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                           |       |         |                    |                                                                                                                    |                                                                                                           |  |         |                      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------|--|
| 24 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                           |       |         | <b>724.688.483</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                           |  |         | <b>3.597.744.483</b> |  |
| 52 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | Medan | 10 Unit | 99.980.000         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi |  | 10 Unit | 99.980.000           |  |
| 53 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | Medan | 6 Unit  | 126.944.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi           |  | 6 Unit  | 3.000.000.000        |  |
| 54 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara                            | Medan | 27 Unit | 497.764.483        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan                        |  | 27 Unit | 497.764.483          |  |

|           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |  |                  |                    |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                    | dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya                                                                                      |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                        | Dibayarkan<br>Pajaknya                                                                                                           |  |                  |                    |  |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |  |                  |                    |  |
|           | <b>UPTD<br/>PERLINDUNGAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>ANAK</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                  | <b>500.510.020</b> | <b>UPTD<br/>PERLINDUNGAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>ANAK</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |  |                  | <b>500.510.020</b> |  |
|           | <b>PROGRAM<br/>PERLINDUNGAN<br/>PEREMPUAN</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |              |                  | <b>382.770.020</b> | <b>PROGRAM<br/>PERLINDUNGAN<br/>PEREMPUAN</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |  |                  | <b>382.770.020</b> |  |
| <b>25</b> | <b>Penyediaan<br/>Layanan Rujukan<br/>Lanjutan bagi<br/>Perempuan Korban<br/>Kekerasan yang<br/>memerlukan<br/>Koordinasi Tingkat<br/>Daerah Provinsi<br/>dan Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                    |              |                  | <b>382.770.020</b> | <b>Penyediaan<br/>Layanan Rujukan<br/>Lanjutan bagi<br/>Perempuan<br/>Korban Kekerasan<br/>yang memerlukan<br/>Koordinasi<br/>Tingkat Daerah<br/>Provinsi dan<br/>Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                  |  |                  | <b>382.770.020</b> |  |
| <b>55</b> | <b>Penyediaan<br/>Layanan Pengaduan<br/>Masyarakat bagi<br/>Perempuan Korban<br/>Kekerasan Tingkat<br/>Daerah Provinsi dan<br/>Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Jumlah<br/>Perempuan<br/>Korban<br/>Kekerasan<br/>Tingkat<br/>Daerah<br/>Provinsi dan<br/>Lintas<br/>Daerah</b> | <b>Sumut</b> | <b>360 Orang</b> | <b>265.030.020</b> | <b>Penyediaan<br/>Layanan<br/>Pengaduan<br/>Masyarakat bagi<br/>Perempuan Korban<br/>Kekerasan Tingkat<br/>Daerah Provinsi<br/>dan Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Jumlah<br/>Perempuan<br/>Korban<br/>Kekerasan<br/>Tingkat<br/>Daerah<br/>Provinsi dan<br/>Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kot</b> |  | <b>360 Orang</b> | <b>265.030.020</b> |  |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |       |            |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |            |                    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------|--|
|    |                                                                                                                                 | Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                                                                           |       |            |                       |                                                                                                                                 | a yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                                                                                        |  |            |                    |  |
| 56 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Sumut | 70 Layanan | 117.740.000           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi |  | 70 Layanan | 117.740.000        |  |
|    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                         |                                                                                                                                        |       |            | <b>117.740.000,00</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                         |                                                                                                                                        |  |            | <b>117.740.000</b> |  |
| 26 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi             |                                                                                                                                        |       |            | <b>117.740.000,00</b> | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi                                     |                                                                                                                                        |  |            | <b>117.740.000</b> |  |



|    |                                                         |                                                          |       |                   |                | Tingkat Daerah<br>Provinsi                              |                                                          |  |                   |             |  |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--|
| 57 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | Sumut | 200 orang Layanan | 117.740.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi |  | 200 orang Layanan | 117.740.000 |  |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumatera Utara tahun 2025 didiskusikan dalam forum diskusi (musrenbang) untuk menjaring dan mengidentifikasi kebutuhan di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang melibatkan perangkat daerah pengampu urusan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi dan kab/kota, dengan tujuan untuk menyelaraskan seluruh target kinerja urusan P3AKB yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta isu strategis yang sudah tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7

Indikator Kinerja

| NO | PROGRAM                                                   | KEGIATAN                                                                                   | LOKASI                  | INDIKATOR KINERJA                                                                      | VOLUME  | CATATAN |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)                               | KAB. DAIRI              | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 2 unit  |         |
|    |                                                           | Pembentukan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)                                | KAB. DAIRI              | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 2 unit  |         |
|    |                                                           | Pembekalan Fasilitator Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)                     | KAB. DAIRI              | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 2 unit  |         |
|    |                                                           | Sosialisasi Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT                                              | KAB. DAIRI              | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                      | 30 unit |         |
|    |                                                           | Penguatan Fasilitator Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)                      | KAB. DAIRI              | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 2 unit  |         |
|    |                                                           | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                      | 50 unit |         |

|  |  |                                                                                                                                                |                       |                                                                                        |         |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  |  | Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Kepala Keluarga Perempuan                                              | KAB. PAKPAK BHARAT    | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                      | 50 unit |  |
|  |  | Pelatihan Calon Fasilitator Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya                                                                                  | KAB. PAKPAK BHARAT    | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 1 unit  |  |
|  |  | Sosialisasi Pembentukan Lembaga Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya                                                                              | KAB. PAKPAK BHARAT    | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 1 unit  |  |
|  |  | Sosialisasi Pelatihan maupun edukasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Berwirausaha/Edukasi Wirausaha Perempuan Melalui Usaha Industri Rumah Tangga | KAB. PAKPAK BHARAT    | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                      | 30 unit |  |
|  |  | Peningkatan Skill dan kapasitas kaum perempuan agar mandiri secara ekonomi melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)             | KOTA PEMATANG SIANTAR | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 1 unit  |  |
|  |  | Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan lintas sektoral dan berkelanjutan dalam hal pemberdayaan Industri Rumahan                       | KAB. SIMALUNGUN       | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                      | 50 unit |  |
|  |  | Pembentukan dan Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)                                                                   | KAB. SAMOSIR          | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 5 unit  |  |
|  |  | Pembentukan Kelapa Muda                                                                                                                        | KAB. TAPANULI UTARA   | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 3 unit  |  |
|  |  | Pembekalan Fasiitator Kelapa Muda                                                                                                              | KAB. TAPANULI UTARA   | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | 3 unit  |  |

|   |                                                             |                                                                                                              |                       |                                                                                                 |           |  |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|   |                                                             | Penguatan kelompok perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui sosialisasi pemanfaatan media online | KAB.TOBA              | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                               | 20 unit   |  |
|   |                                                             | Soialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                    | KOTA GUNUNG SITOLI    | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                               | 35 unit   |  |
|   |                                                             | Soialisasi Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui TOP                                                            | KAB. NIAS             | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                               | 23 unit   |  |
|   |                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kapasitas Perempuan Marginal melalui KELAPA MUDA                       | KAB. NIAS             | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan          | 2 unit    |  |
|   |                                                             | Sosialisasi Penguatan KELAPA MUDA dalam bidang Politik                                                       | KAB. NIAS             | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan          | 3 unit    |  |
|   |                                                             | Sosialisasi Pengembangan Potensi Perempuan Penyintas Kekerasan melalui KELAPA MUDA                           | KOTA PADANG SIDIMPUAN | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan          | 2 unit    |  |
|   |                                                             | Pelatihan usaha IR                                                                                           | KOTA PADANG SIDIMPUAN | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                               | 20 unit   |  |
|   |                                                             | Pelatihan KELAPA MUDA                                                                                        | KAB. TAPANULI SELATAN | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan          | 3 unit    |  |
|   |                                                             | Pelatihan Fasilitator KELAPA MUDA                                                                            | KAB. TAPANULI SELATAN | Unit kelas perempuan yang dibentuk untuk peningkatan peran perempuan dalam pembangunan          | 3 unit    |  |
| 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan     | KAB. DAIRI            | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 100 orang |  |

|  |  |                                                                                                             |                         |                                                                                                 |           |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|  |  | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan rujukan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota | KAB. MANDAILIN G NATAL  | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 100 orang |  |
|  |  | Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan AMPK                          | KAB. MANDAILIN G NATAL  | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 150 orang |  |
|  |  | Penyuluhan serta Sosialisasi Desa Ramah Perempuan                                                           | KAB. PADANG LAWAS UTARA | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 150 orang |  |
|  |  | Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan                                                             | KAB. PADANG LAWAS UTARA | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 200 orang |  |
|  |  | Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga                                                         | KAB. PADANG LAWAS UTARA | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 150 orang |  |
|  |  | Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan                                                            | KAB. PADANG LAWAS UTARA | Meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan | 100 orang |  |
|  |  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan PP Kewenangan Kabupaten/Kota                      | KOTA GUNUNG SITOLI      | Meningkatnya jumlah toko online perempuan pelaku Industri Rumahan                               | 10 unit   |  |

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2021-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK
5. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja
6. Peningkatan Pembangunan Keluarga

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
2. Meningkatkan Perlindungan Anak;
3. Meningkatkan Pengendalian Penduduk Tumbuh Seimbang.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi teknis dan koordinasi pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran Indikator Kinerja urusan;
2. Pencapaian Peningkatan Kualitas Layanan;
3. Pencapaian Pemanfaatan Data dan Informasi;
4. Pencapaian Prioritas Nasional melalui Kementerian/Lembaga;
5. Pencapaian Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara umum rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebanyak 10 program, 26 kegiatan dan 57 sub kegiatan pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                       |
| <b>I</b>  | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                    |
| <b>1</b>  | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                          |
| 1         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                 |
| 2         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                         |
| <b>2</b>  | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>         |
| 3         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  |
| <b>3</b>  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                               |
| 4         | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                |
| 5         | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               |
| <b>4</b>  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |
| 6         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi |
| <b>5</b>  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                               |



|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                          |
| 8          | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                                          |
| 9          | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                      |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                       |
| <b>6</b>   | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                      |
| 10         | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                           |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                             |
| <b>7</b>   | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>                                       |
| 11         | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           |
| 12         | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                     |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                            |
| <b>8</b>   | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                                |
| 13         | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |
| <b>9</b>   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                     |
| 14         | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             |
| 15         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                           |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                            |
| <b>10</b>  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |
| 16         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                 |
| 17         | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                       |
| <b>11</b>  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |
| 18         | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                     |
| 19         | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                 |
| 20         | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan                                                                |
| 21         | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                  |
| <b>VII</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                               |
| <b>12</b>  | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>                         |
| 22         | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23          | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain                                                                                                                                                |
| 24          | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                                                                                                                            |
| <b>13</b>   | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 25          | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                                                                                                                       |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14</b>   | <b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                                                                            |
| 26          | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                                                                            |
| 27          | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                                                                                                                                |
| 28          | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                                      |
| 29          | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>15</b>   | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                                                                                                                |
| 30          | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IX</b>   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>16</b>   | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                                                                                   |
| 31          | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                                                                                                                                                                                     |
| 32          | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                                                                             |
| 33          | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34          | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 |
| <b>17</b>   | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                         |
| 35          | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                                            |
| 36          | Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga                                                                                                                                                                                             |
| 37          | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |
| <b>X</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>18</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 38          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>19</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>20</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                             |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                 |
| 21                                          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                      |
| 43                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                           |
| 44                                          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       |
| 45                                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                        |
| 46                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                               |
| 47                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                   |
| 48                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                               |
| 22                                          | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                               |
| 49                                          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                  |
| 50                                          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                         |
| 23                                          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                  |
| 51                                          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               |
| 24                                          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                   |
| 52                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |
| 53                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             |
| 54                                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             |
| <b>UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b> |                                                                                                                                                                |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>       |                                                                                                                                                                |
| 25                                          | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |
| 55                                          | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               |
| 56                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>     |                                                                                                                                                                |
| 26                                          | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>                                     |
| 57                                          | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                        |

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas P3AKB Sumatera Utara Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah disusun program dan kegiatan DP3AKB Sumatera Utara untuk Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2025**

| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR                                                                             | RENCANA TAHUN 2025 |             |                | CATATAN PENTING | PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 |                | SUMBER DANA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                                                      |                                                                                       | Lokasi             | Target      | Pagu Indikatif |                 | Target                    | Pagu Indikatif |             |
|    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA               |                                                                                       |                    |             |                | 26.647.435.212  |                           | 30.982.803.212 |             |
| I  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                            | Jumlah Lembaga yang Responsif Gender                                                  |                    | 56          | 5.368.954.187  |                 | 59                        | 6.305.849.606  |             |
| 1  | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Persentase alokasi Anggaran Responsive Gender pada APBD                               |                    | 10%         | 170.803.000    |                 | 11%                       | 587.883.300    |             |
| 1  | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                         | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                              | Sumut              | 1 kebijakan | 38.000.000     |                 | 2 kebijakan               | 241.800.000    |             |
| 2  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                  | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | Sumut              | 4 Laporan   | 45.635.000     |                 | 5 Laporan                 | 250.198.500    |             |

|   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |       |                      |                      |  |                      |                      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                                  | Sumut | 4 Dokumen            | 42.168.000           |  | 5 Dokumen            | 46.384.800           |  |
| 4 | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                      | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi                                                                                                                                            | Sumut | 100 orang            | 45.000.000           |  | 150 orang            | 49.500.000           |  |
| 2 | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>        | <b>Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</b>                                                                                           |       | <b>20 Organisasi</b> | <b>1.050.000.000</b> |  | <b>23 Organisasi</b> | <b>1.155.000.000</b> |  |
| 5 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Sumut | 50 lembaga           | 100.000.000          |  | 70 lembaga           | 110.000.000          |  |
| 6 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi                                                                                                   | Sumut | 150 Lembaga          | 950.000.000          |  | 200 Lembaga          | 1.045.000.000        |  |
| 3 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                              | <b>Jumlah Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                                                                                         |       | <b>10 Lembaga</b>    | <b>4.148.151.187</b> |  | <b>13 Lembaga</b>    | <b>4.562.966.306</b> |  |

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |       |             |                    |  |             |                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 7  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                      | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi | Sumut | 100 lembaga | 150.000.000        |  | 150 lembaga | 165.000.000        |  |
| 8  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi               | Sumut | 800 Orang   | 3.874.261.187      |  | 850 Orang   | 4.261.687.306      |  |
| 9  | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                                                                   | Sumut | 21 Unit     | 123.890.000        |  | 25 Unit     | 136.279.000        |  |
| II | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               | <b>Persentase perlindungan Perempuan yang diintervensi</b>                                                                                                   |       | <b>80%</b>  | <b>414.885.966</b> |  | <b>100%</b> | <b>756.374.563</b> |  |
| 4  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Perangkat Daerah/ Lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>                                                            |       | <b>70</b>   | <b>50.847.500</b>  |  | <b>75</b>   | <b>255.932.250</b> |  |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi     | Sumut | 4 Dokumen   | 30.847.500         |  | 5 Dokumen   | 133.932.250        |  |

|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |       |                     |             |  |                     |             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|--|
| 11  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan                                                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                 | Sumut | 42 Perangkat Daerah | 20.000.000  |  | 42 Perangkat Daerah | 122.000.000 |  |
| 5   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                         | <b>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                       |       | 30                  | 364.038.466 |  | 35                  | 500.442.313 |  |
| 12  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi     | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas      | Sumut | 20 Orang            | 34.508.750  |  | 60 Orang            | 137.959.625 |  |
| 13  | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                        | Sumut | 500 org             | 188.977.050 |  | 600 org             | 207.874.755 |  |
| 14  | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Sumut | 2 Dokumen           | 140.552.666 |  | 3 Dokumen           | 154.607.933 |  |
| III | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                  | <b>Indeks Kualitas Keluarga</b>                                                                                                                    |       | 77.29               | 84.952.506  |  | 77.79               | 93.447.757  |  |



|    |                                                                                                                              |                                                                                                                   |       |                   |                    |  |                   |                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| 6  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                | <b>Jumlah Lembaga penyedia layanan yang mendapatkan penguatan dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan Hak Anak</b> |       | <b>10 Lembaga</b> | <b>84.952.506</b>  |  | <b>13 Lembaga</b> | <b>93.447.757</b>  |  |
| 15 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga kewenangan Provinsi     | Sumut | 2 Dokumen         | 84.952.506         |  | 3 Dokumen         | 93.447.757         |  |
| IV | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                       | <b>Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak</b>                                         |       | <b>42 PD</b>      | <b>67.312.000</b>  |  | <b>42 PD</b>      | <b>124.043.200</b> |  |
| 7  | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>Tersedianaya Data gender dan Anak yang valid</b>                                                               |       | <b>1 Dokumen</b>  | <b>67.312.000</b>  |  | <b>1 Dokumen</b>  | <b>124.043.200</b> |  |
| 16 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                     | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                        | Sumut | 3 Dokumen         | 24.382.000         |  | 4 Dokumen         | 76.820.200         |  |
| 17 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                               | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                     | Sumut | 2 Dokumen         | 42.930.000         |  | 3 Dokumen         | 47.223.000         |  |
| V  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                      | <b>Persentase Kluster Hak Anak diintervensi</b>                                                                   |       | <b>100%</b>       | <b>524.301.000</b> |  | <b>100%</b>       | <b>576.731.100</b> |  |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |       |                      |                    |  |                      |                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--|
| 8  | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                                 | <b>Jumlah Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pelembagaan PHA</b>                                                          |       | <b>27 Organisasi</b> | <b>147.622.000</b> |  | <b>28 Organisasi</b> | <b>162.384.200</b> |  |
| 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                 | Sumut | 2 dokumen            | 45.000.000         |  | 3 dokumen            | 49.500.000         |  |
| 19 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | Sumut | 25 perangkat daerah  | 102.622.000        |  | 25 perangkat daerah  | 112.884.200        |  |
| 9  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                     | <b>Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan.</b>                                                                 |       | <b>50</b>            | <b>376.679.000</b> |  | <b>120</b>           | <b>414.346.900</b> |  |
| 20 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                           | Sumut | 500 Orang            | 86.248.000         |  | 600 Orang            | 94.872.800         |  |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |       |            |                    |  |            |                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|
| 21 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota    | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota    | Sumut | 2 kegiatan | 152.221.000        |  | 4 kegiatan | 167.443.100        |  |
| 22 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                             | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                               | Sumut | 3 kegiatan | 138.210.000        |  | 5 kegiatan | 152.031.000        |  |
| VI | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                       | <b>Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 penduduk anak)</b>                                                                      |       | <b>2,7</b> | <b>276.588.850</b> |  | <b>2,6</b> | <b>354.247.735</b> |  |
| 10 | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>                                    |       | <b>80%</b> | <b>115.327.056</b> |  | <b>80%</b> | <b>176.859.762</b> |  |
| 23 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                              | Sumut | 1 Dokumen  | 25.553.000         |  | 2 Dokumen  | 78.108.300         |  |
| 24 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | Sumut | 50 Orang   | 34.672.056         |  | 60 Orang   | 38.139.262         |  |

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |       |            |             |  |            |             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 25 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA               | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi                                                                | Sumut | 2 kegiatan | 55.102.000  |  | 3 kegiatan | 60.612.200  |  |
| 11 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                |       | 30         | 161.261.794 |  | 35         | 177.387.973 |  |
| 26 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                    | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                         | Sumut | 5 Kegiatan | 32.126.744  |  | 6 Kegiatan | 35.339.418  |  |
| 27 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                          | Sumut | 4 Dokumen  | 44.626.300  |  | 5 Dokumen  | 49.088.930  |  |
| 28 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan                                                               | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | Sumut | 20 Orang   | 34.508.750  |  | 30 Orang   | 37.959.625  |  |

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |       |              |                    |  |           |                    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|--|-----------|--------------------|--|
| 29  | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                            | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus                                                                                                                                                             | Sumut | 500 orang    | 50.000.000         |  | 600 orang | 55.000.000         |  |
| VII | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                         | <b>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</b>                                                                                                                                                         |       | <b>59,80</b> | <b>365.766.700</b> |  | <b>60</b> | <b>484.741.849</b> |  |
| 12  | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>   | <b>Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                                                        |       | <b>57,00</b> | <b>287.366.150</b> |  | <b>60</b> | <b>398.501.244</b> |  |
| 30  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                          | Sumut | 2 Dokumen    | 51.750.750         |  | 3 Dokumen | 56.925.825         |  |
| 31  | Advokasi dan sosialisasi GDPK                                                                                                                | Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi GDPK                                                                                                                                                         | Sumut | 1 laporan    | 30.000.000         |  | 2 laporan | 115.398.479        |  |
| 32  | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk memperkuat Integrasi Program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | Sumut | 2 Daerah     | 85.415.400         |  | 3 Daerah  | 93.956.940         |  |

|      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |       |                  |                    |  |                  |                    |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 33   | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Sumut | 5 Laporan        | 70.200.000         |  | 6 Laporan        | 77.220.000         |  |
| 34   | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Bangsa Kencana                                                                                        | Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan                                                                                                            | Sumut | 1 dokumen        | 50.000.000         |  | 2 dokumen        | 55.000.000         |  |
| 13   | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                          | <b>Jumlah Dokumen pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                 |       | <b>3 Dokumen</b> | <b>78.400.550</b>  |  | <b>1 Dokumen</b> | <b>86.240.605</b>  |  |
| 35   | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                     | Jumlah dokumen hasil pemetaan Program Bangsa Kencana                                                                                                                           | Sumut | 1 Dokumen        | 25.000.000         |  | 2 Dokumen        | 27.500.000         |  |
| 36   | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                            | Jumlah Dokumen Profil program bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                     | Sumut | 1 Dokumen        | 38.400.550         |  | 2 Dokumen        | 42.240.605         |  |
| 37   | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                                             | Jumlah dokumen hasil Pengembangan Model Solusi strategis pengendalian dampak kependudukan                                                                                      | Sumut | 1 Dokumen        | 15.000.000         |  | 2 Dokumen        | 16.500.000         |  |
| VIII | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                 | <b>Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)</b>                                                                                                                                    |       | <b>63%</b>       | <b>392.816.000</b> |  | <b>66%</b>       | <b>632.097.600</b> |  |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |             |  |            |             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 14 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah stakeholder dan mitra yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana                                                                                                                                                      |       | 20        | 285.541.000 |  | 21         | 314.095.100 |  |
| 38 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                                                              | Sumut | 4 Dokumen | 40.130.000  |  | 5 Dokumen  | 44.143.000  |  |
| 39 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga                                                        | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                   | Sumut | 7 Daerah  | 29.861.000  |  | 8 Daerah   | 32.847.100  |  |
| 40 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                    | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Sumut | 9 Laporan | 94.924.000  |  | 10 Laporan | 104.416.400 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |       |           |             |  |           |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|--|
| 41 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                               | Sumut | 3 Daerah  | 70.626.000  |  | 4 Daerah  | 77.688.600  |  |
| 42 | Pengembangan dan penyediaan materi dan Sarana promosi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan pembangunan keluarga Sesuai kearifan budaya Lokal | Jumlah dokumen pengembangan, penyediaan materi dan sarana promosi dan KIE                                                      | Sumut | 1 Dokumen | 50.000.000  |  | 2 Dokumen | 55.000.000  |  |
| 15 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                   | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang dibina dan berperan aktif dalam pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB</b> |       | 26        | 107.275.000 |  | 26        | 318.002.500 |  |
| 43 | Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB                               | Jumlah dokumen pemberdayaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB               | Sumut | 1 Dokumen | 35.000.000  |  | 2 Dokumen | 138.500.000 |  |



|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |       |               |                    |  |               |                    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------|--|---------------|--------------------|--|
| 44 | Peningkatan peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB           | Jumlah organisasi masyarakat yang dibina                                                                                                                                 | Sumut | 50 organisasi | 25.000.000         |  | 60 organisasi | 127.500.000        |  |
| 45 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana                                                | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) | Sumut | 25 Organisasi | 47.275.000         |  | 30 Organisasi | 52.002.500         |  |
| IX | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                       | <b>Angka Kelahiran pada Usia 15-19 Tahun ASFR 15-19</b>                                                                                                                  |       | <b>15,6</b>   | <b>202.188.000</b> |  | <b>15,1</b>   | <b>622.406.800</b> |  |
| 16 | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Jumlah organisasi dan kelompok keluarga yang memperoleh pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>                                                            |       | <b>13</b>     | <b>154.500.000</b> |  | <b>15</b>     | <b>469.950.000</b> |  |
| 46 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                   | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                                                 | Sumut | 25 organisasi | 43.020.000         |  | 35 organisasi | 147.322.000        |  |
| 47 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                           | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                               | Sumut | 3 Dokumen     | 39.670.000         |  | 4 Dokumen     | 143.637.000        |  |

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |       |            |                   |  |            |                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|--|------------|--------------------|--|
| 48 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                         | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                  | Sumut | 3 Kelompok | 42.680.000        |  | 4 Kelompok | 146.948.000        |  |
| 49 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Sumut | 3 Daerah   | 29.130.000        |  | 4 Daerah   | 32.043.000         |  |
| 17 | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>                           |       | <b>3</b>   | <b>47.688.000</b> |  | <b>5</b>   | <b>152.456.800</b> |  |
| 50 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                            | Sumut | 1 Dokumen  | 15.081.000        |  | 2 Dokumen  | 16.589.100         |  |
| 51 | Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga             | Sumut | 2 Laporan  | 16.000.000        |  | 3 Laporan  | 17.600.000         |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |                |  |                 |                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------|--|
| 52 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Sumut | 30 Organisasi   | 16.607.000     |  | 40 Organisasi   | 118.267.700    |  |
| X  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100%            | 18.449.159.983 |  | 100%            | 20.494.075.981 |  |
| 18 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100%            | 124.432.000    |  | 100%            | 136.875.200    |  |
| 53 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         | Medan | 11 Dokumen      | 124.432.000    |  | 11 Dokumen      | 136.875.200    |  |
| 19 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100%            | 13.065.221.270 |  | 100%            | 14.371.743.397 |  |
| 54 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medan | 12 Orang/ Bulan | 13.065.221.270 |  | 12 Orang/ Bulan | 14.371.743.397 |  |
| 20 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100%            | 2.185.673.312  |  | 100%            | 2.404.240.643  |  |

|           |                                                                  |                                                                                        |       |             |                      |  |             |                      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|--|-------------|----------------------|--|
| 55        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Medan | 12 Laporan  | 1.704.448.312        |  | 12 Laporan  | 1.874.893.143        |  |
| 56        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Medan | 12 Laporan  | 474.400.000          |  | 12 Laporan  | 521.840.000          |  |
| 57        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Medan | 4 Laporan   | 6.825.000            |  | 4 Laporan   | 7.507.500            |  |
| <b>21</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                        |       | <b>100%</b> | <b>1.958.134.918</b> |  | <b>100%</b> | <b>2.353.948.410</b> |  |
| 58        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Medan | 100 Laporan | 1.200.369.050        |  | 100 Laporan | 1.420.405.955        |  |
| 59        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Medan | 100 Dokumen | 6.248.000            |  | 100 Dokumen | 6.872.800            |  |
| 60        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Medan | 4 Paket     | 32.051.950           |  | 4 Paket     | 35.257.145           |  |
| 61        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Medan | 3 Paket     | 494.804.341          |  | 3 Paket     | 544.284.775          |  |
| 62        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Medan | 8 Paket     | 203.936.025          |  | 8 Paket     | 224.329.628          |  |
| 63        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Medan | 2 Paket     | 20.725.552           |  | 2 Paket     | 122.798.107          |  |

|    |                                                                                              |                                                                                                          |       |            |             |  |            |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 22 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                             |                                                                                                          |       | 100%       | 185.420.000 |  | 100%       | 203.962.000 |  |
| 64 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                      | Medan | 61 Orang   | 127.270.000 |  | 61 Orang   | 139.997.000 |  |
| 50 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                   | Medan | 61 Paket   | 58.150.000  |  | 61 Paket   | 63.965.000  |  |
| 23 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                |                                                                                                          |       | 100%       | 205.590.000 |  | 100%       | 226.149.000 |  |
| 51 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                      | Medan | 12 Dokumen | 205.590.000 |  | 12 Dokumen | 226.149.000 |  |
| 24 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 |                                                                                                          |       | 100%       | 724.688.483 |  | 100%       | 797.157.331 |  |
| 52 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Medan | 10 Unit    | 99.980.000  |  | 10 Unit    | 109.978.000 |  |
| 53 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | Medan | 6 Unit     | 126.944.000 |  | 6 Unit     | 139.638.400 |  |

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |       |             |                    |  |             |                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 54 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                   | Medan | 27 Unit     | 497.764.483        |  | 27 Unit     | 547.540.931        |  |
|    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                                          | <b>Persentase perlindungan perempuan yang diintervensi</b>                                                                               |       | <b>100%</b> | <b>382.770.020</b> |  | <b>100%</b> | <b>421.047.022</b> |  |
| 25 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan</b>                                                            |       | <b>100%</b> | <b>382.770.020</b> |  | <b>100%</b> | <b>421.047.022</b> |  |
| 55 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | Sumut | 360 Orang   | 265.030.020        |  | 400 Orang   | 291.533.022        |  |
| 56 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi   | Sumut | 70 Layanan  | 117.740.000        |  | 80 Layanan  | 129.514.000        |  |

|    |                                                                                                                     |                                                                     |       |             |                       |  |             |                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|--|
|    | <b>PROGRAM<br/>PERLINDUNGAN KHUSUS<br/>ANAK</b>                                                                     | <b>Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000<br/>penduduk Anak)</b> |       | <b>100%</b> | <b>117.740.000,00</b> |  | <b>100%</b> | <b>117.740.000,00</b> |  |
| 26 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan kewenangan Provinsi      |       | 100%        | 117.740.000,00        |  | 100%        | 117.740.000,00        |  |
| 57 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                             | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi            | Sumut | 200 orang   | 67.740.000            |  | 200 orang   | 74.514.000            |  |
| 58 | Peneyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi          | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi  | Sumut | 300 orang   | 50.000.000            |  | 300 orang   | 55.000.000            |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan diharapkan menjadi perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi serta kondisi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan layanan dan kondisi lain yang tidak dapat diantisipasi seperti bencana.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen masyarakat, Akademisi, tenaga ahli, Lembaga Masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara serta seluruh pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam penentuan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA



SRI SURIANI PURNAMA WATI, S.Si, Apt, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196712071997032001